



# BULAN RAMADAN, RAPAT-RAPAT PARIPURNA TERTUNDA

## Pembahasan Anggaran Perubahan Terancam Molor

*Momen Ramadan seperti ini tidak ada agenda penting di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Sejak bulan puasa pertama sampai pertengahan, wakil rakyat di DPRD Kalbar jarang menggelar rapat paripurna, istimewa ataupun internal. Padahal beragam agenda sudah tercatat dalam surat keputusan Penetapan Perubahan dan Penjadwalan Ulang Jadwal Kegiatan DPRD Kalbar, Juni sampai September 2014.*

**FATAHILLAH** Abrar, anggota DPRD Kalbar mengakui beberapa rapat paripurna istimewa dengan eksekutif, rapat internal, rapat ban-dan dan lain-lain harus tertunda. "Penyebab utamanya ketika Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat tanggal 7 Juni 2014 tidak jadi. Katanya BPK belum siap. Akhirnya berdampak terhadap agenda-agenda rapat paripurna dan istimewa lain-jelasnya.

◆ Ke Halaman 15 kolom 1



**Rapat yang Tertunda**

GRAFIS : SIGIT /PONTIANAKPOST

- ▶ Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK- kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
- ▶ Rapat Internal Komisi-komisi DPRD Provinsi Kalbar.
- ▶ Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013.
- ▶ Rapat internal Fraksi-fraksi DPRD Kalbar membahas nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013.)
- ▶ Rapat gabungan badan anggaran DPRD Kalbar dengan tim anggaran eksekutif membahas Raperda tentang Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013.
- ▶ Rapat internal Komisi-komisi DPRD Kalbar.
- ▶ Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK- kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
- ▶ Rapat Internal Komisi-komisi DPRD Provinsi Kalbar.
- ▶ Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013.
- ▶ Rapat internal Fraksi-fraksi DPRD Kalbar membahas nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013.
- ▶ Rapat Paripurna Penyampaian Fraksi DPRD Kalbar terhadap nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013.
- ▶ Rapat internal Komisi-komisi DPRD Kalbar.

Sumber : DPRD Provinsi Kalimantan Barat.





## Pembahasan Anggaran Perubahan Perubahan Terancam Molor

**Sambungan dari halaman 9**

Agenda rapat tertunda tersebut diantaranya Rapat Internal Komisi-Komisi DPRD Kalbar 8 dan 10 Juni 2014. Kemudian Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 tanggal 11-Juni 2014.

Lalu rapat tak kalah pentingnya yakni Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kalbar terhadap nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 dengan Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gu-

bernur Kalbar atas permintaan umum fraksi-fraksi DPRD Kalbar terhadap nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013. "Semua rapat tersebut tertunda. Sampai kapan kami tidak tahu," ujarnya.

Politisi PKS ini memaparkan selain alasan BPK belum siap, pihak DPRD juga menunggu penjadwalan dari eksekutif kembali. Di sana juga tidak dapat ditentukan apakah siap atau tidak. "Apakah nantinya dijadwalkan ulang agenda tertunda kami belum tahu. Saya sebagai anggota Bannus belum memperoleh undangan dari pimpinan," tuturnya. "Kami masih menunggu koordinasi

antara pimpinan legislatif eksekutif dan BPK seperti apa, tempatnya.

Dalam Peraturan DPRD Kalbar nomor 1 tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kalbar tertanggal 10 Desember 2009 dan Peraturan DPRD Kalbar Nomor 1 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan DPRD Kalbar nomor 1 tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kalbar tertanggal 12 Mei 2010 pasal 121 Pertanggungjawaban APBD ayat 1 dinyatakan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD. "Itu memang benar. Namun ramahnya tadi berada di tingkat pimpinan legislatif eksekutif dan BPK RI. Kami juga kurang paham. Tetapi dampak lain seperti APBD Perubahan dan APBD 2013 juga terancam molor," ucapnya. **(den)**

nyataannya tahun 2013 ini sudah memasuki bulan Juni atau bulan 7. "Itu juga menjadi pertanyaan kami," kata Fatahillah.

Di pasal 122 dinyatakan apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat 1, BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tetap diajukan kepala daerah kepada DPRD. "Itu memang benar. Namun ramahnya tadi berada di tingkat pimpinan legislatif eksekutif dan BPK RI. Kami juga kurang paham. Tetapi dampak lain seperti APBD Perubahan dan APBD 2013 juga terancam molor," ucapnya. **(den)**